



PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN HAJI
DAN UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Haji dan Umrah tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Haji dan Umrah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
4. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 903);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Instansi Vertikal adalah Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi dan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota pada Kementerian Haji dan Umrah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Haji dan Umrah di daerah.
2. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah Instansi Vertikal Kementerian Haji dan Umrah di wilayah provinsi.
3. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Kabupaten/Kota adalah Instansi Vertikal Kementerian Haji dan Umrah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
4. Kementerian Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II
KANTOR WILAYAH
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tipologi

Pasal 2

- (1) Kantor Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 3

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian dalam wilayah provinsi berdasarkan

kebijakan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. pelaksanaan tugas teknis di bidang haji dan umrah di provinsi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang haji dan umrah;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang haji dan umrah di provinsi;
- e. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Kantor Wilayah; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 5

Tipologi Kantor Wilayah terdiri atas:

- a. Kantor Wilayah tipologi A; dan
- b. Kantor Wilayah tipologi B.

Pasal 6

- (1) Penentuan tipe Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada pola tipologi.
- (2) Pola tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kedua **Struktur Organisasi**

Pasal 7

Susunan organisasi Kantor Wilayah tipologi A terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah;
- c. Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, informasi, sarana dan prasarana, dan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan pembendaharaan, verifikasi akuntansi instansi dan sistem informasi manajemen, akuntansi barang milik negara, dan pelaporan keuangan dan barang milik negara;
- c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai;
- d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas;
- e. pelaksanaan pengolahan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada Kantor Wilayah.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 11

Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, tugas teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina dan pengawasan haji dan umrah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana di bidang bina dan pengawasan haji dan umrah;
- b. pelaksanaan tugas teknis di bidang bina dan pengawasan haji dan umrah;
- c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina dan pengawasan haji dan umrah; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang bina dan pengawasan haji dan umrah.

Pasal 13

Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 14

Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, tugas teknis, bimbingan teknis, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan haji dan fasilitasi pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana di bidang pelayanan haji dan fasilitasi pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah;
- b. pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan haji dan fasilitasi pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah;
- c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan haji dan fasilitasi pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah; dan

- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan haji dan fasilitasi pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.

Pasal 16

Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 17

Susunan organisasi Kantor Wilayah tipologi B terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Bina Haji dan Umrah dan Pelayanan Haji; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 18

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi, dan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan perpendaharaan, verifikasi akuntansi instansi dan sistem informasi manajemen, akuntansi barang milik negara, dan pelaporan keuangan dan barang milik negara;
- c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai;
- d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas;
- e. pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan

- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada Kantor Wilayah.

Pasal 20

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 21

Bidang Bina Haji dan Umrah dan Pelayanan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, tugas teknis, bimbingan teknis, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina haji dan umrah dan pelayanan haji.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Bina Haji dan Umrah dan Pelayanan Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan di bidang bina haji dan umrah dan pelayanan haji;
- b. pelaksanaan tugas teknis di bidang bina haji dan umrah dan pelayanan haji;
- c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina haji dan umrah dan pelayanan haji; dan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang bina haji dan umrah dan pelayanan haji.

Pasal 23

Bidang Bina Haji dan Umrah dan Pelayanan Haji terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB III
KANTOR KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH
KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tipologi

Pasal 24

- (1) Kantor Kementerian Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah.

(2) Kantor Kementerian Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

Pasal 25

Kantor Kementerian Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian dalam wilayah kabupaten/kota.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Kementerian Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan tugas teknis di bidang haji dan umrah di Kabupaten/Kota;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang haji dan umrah di Kabupaten/Kota;
- d. pengordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Kantor Kementerian Kabupaten/Kota; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.

Pasal 27

Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Kantor Kementerian Kabupaten/Kota tipologi A;
- b. Kantor Kementerian Kabupaten/Kota tipologi B; dan
- c. Kantor Kementerian Kabupaten/Kota tipologi C.

Pasal 28

- (1) Penentuan tipe Kantor Kementerian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 didasarkan pada pola tipologi.
- (2) Pola tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kedua
Kantor Kementerian Kabupaten/Kota Tipologi A

Pasal 29

Kantor Kementerian Kabupaten/Kota Tipologi A terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah;
- c. Seksi Pelayanan Haji dan Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, informasi, sarana dan prasarana, administrasi keuangan, serta urusan administrasi.
- (2) Seksi Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan tugas teknis, dan pelaporan di bidang bina dan pengawasan haji dan umrah.
- (3) Seksi Pelayanan Haji dan Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan tugas teknis, dan pelaporan di bidang pelayanan haji dan fasilitasi pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.

Bagian Ketiga
Kantor Kementerian Kabupaten/Kota Tipologi B

Pasal 31

Kantor Kementerian Kabupaten/Kota Tipologi B terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bina Haji dan Umrah dan Pelayanan Haji; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 32

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, informasi, sarana dan prasarana, administrasi keuangan, serta urusan administrasi.
- (2) Seksi Bina Haji dan Umrah dan Pelayanan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan tugas teknis, dan pelaporan di bidang bina haji dan umrah dan layanan haji.

Bagian Keempat
Kantor Kementerian Kabupaten/Kota Tipologi C

Pasal 33

Kantor Kementerian Kabupaten/Kota Tipologi C terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 34

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, informasi, sarana dan prasarana, administrasi keuangan, serta urusan administrasi.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 35

Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Kabupaten/Kota dapat menetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai

dengan jenjang dan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Kabupaten/Kota dapat mengusulkan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 38

Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 39

- (1) Instansi Vertikal harus menyiapkan bahan penyusunan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Instansi Vertikal.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 40

- (1) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 41

Instansi Vertikal harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Instansi Vertikal.

Pasal 42

Setiap unsur di lingkungan Instansi Vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Instansi Vertikal maupun dengan instansi lain di luar Instansi Vertikal Kementerian.

Pasal 43

Setiap unsur di lingkungan Instansi Vertikal harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI
JABATAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 46

- (1) Kepala Kantor Wilayah merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Kantor Kabupaten/Kota, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan

pengawas atau jabatan struktural IV.b.

Pasal 47

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat struktural eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Pejabat Administrator atau Pejabat eselon III dan Pejabat Pengawas atau Pejabat eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri.

BAB VII

**DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA,
TIPE, BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 48

Daftar nama, tempat kedudukan, wilayah kerja, dan tipe Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

Bagan struktur organisasi Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 50

Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Kantor Kementerian Kabupaten/Kota, tugas teknis di bidang haji dan umrah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Kabupaten/Kota terdekat dengan menempatkan sumber daya manusia di Kabupaten/Kota dimaksud.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288) yang melaksanakan tugas di bidang haji dan umrah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2025

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

MMOCHAMAD IRFAN YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN
HAJI DAN UMRAH

DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, DAN TIPE KANTOR WILAYAH

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kantor Wilayah Aceh	A	Provinsi Aceh	Aceh	1	Kab. Bireuen	B
					2	Kab. Aceh Timur	B
					3	Kab. Aceh Tamiang	C
					4	Kab. Aceh Selatan	B
					5	Kab. Nagan Raya	B
					6	Kab. Aceh Barat Daya	C
					7	Kab. Gayo Lues	C
					8	Kab. Aceh Jaya	C
					9	Kota Sabang	C
					10	Kota Subulussalam	C
					11	Kab. Aceh Besar	B
					12	Kab. Aceh Singkil	C
					13	Kab. Aceh Tengah	B
					14	Kab. Aceh Utara	B
					15	Kota Langsa	B
					16	Kab. Aceh Barat	B

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					17	Kab. Pidie	B
					18	Kota Banda Aceh	A
					19	Kab. Bener Meriah	B
					20	Kab. Simeulue	C
					21	Kota Lhokseumawe	B
					22	Kab. Aceh Tenggara	B
					23	Kab. Pidie Jaya	B
2.	Kantor Wilayah Sumatera Utara	A	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	1	Kab. Deli Serdang	B
					2	Kab. Labuhanbatu	B
					3	Kab. Mandailing Natal	B
					4	Kab. Langkat	B
					5	Kab. Asahan	B
					6	Kota Padang Sidempuan	C
					7	Kota Binjai	B
					8	Kab. Serdang Bedagai	B
					9	Kab. Tapanuli Selatan	C
					10	Kab. Padang Lawas Utara	C
					11	Kab. Simalungun	B
					12	Kota Pematangsiantar	C
					13	Kota Tebing Tinggi	C
					14	Kota Tanjung Balai	C
					15	Kota Sibolga	C
					16	Kab. Karo	C

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					17	Kab. Dairi	C
					18	Kab. Padang Lawas	C
					19	Kab. Labuhanbatu Selatan	C
					20	Kab. Labuhanbatu Utara	C
					21	Kab. Tapanuli Tengah	C
					22	Kab. Batu Bara	B
					23	Kota Medan	A
3.	Kantor Wilayah Sumatera Barat	A	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	1	Kab. Tanah Datar	B
					2	Kota Bukittinggi	B
					3	Kab. Lima Puluh Kota	B
					4	Kab. Solok	B
					5	Kab. Dharmasraya	C
					6	Kota Payakumbuh	C
					7	Kab. Pesisir Selatan	C
					8	Kota Solok	C
					9	Kab. Sijunjung	C
					10	Kab. Solok Selatan	C
					11	Kota Padang	A
					12	Kota Pariaman	C
					13	Kab. Padang Pariaman	B
					14	Kab. Pasaman	C
					15	Kota Padang Panjang	C
					16	Kab. Agam	B

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Kantor Wilayah Riau	A	Provinsi Riau	Riau	17	Kab. Pasaman Barat	B
					18	Kota Sawahlunto	C
					1	Kota Pekanbaru	A
					2	Kab. Indragiri Hilir	B
					3	Kab. Kepulauan Meranti	C
					4	Kab. Indragiri Hulu	B
					5	Kab. Bengkalis	B
					6	Kab. Kuantan Singingi	C
					7	Kab. Kampar	A
					8	Kab. Rokan Hilir	B
					9	Kab. Rokan Hulu	B
					10	Kab. Pelalawan	B
					11	Kab. Siak	B
					12	Kota Dumai	B
5.	Kantor Wilayah Jambi	B	Provinsi Jambi	Jambi	1	Kota Jambi	A
					2	Kab. Tanjung Jabung Barat	B
					3	Kab. Muaro Jambi	B
					4	Kab. Tanjung Jabung Timur	C
					5	Kota Sungai Penuh	C
					6	Kab. Batanghari	B
					7	Kab. Bungo	B
					8	Kab. Kerinci	B

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					9	Kab. Merangin	B
					10	Kab. Sarolangun	B
					11	Kab. Tebo	C
6.	Kantor Wilayah Kepulauan Riau	B	Provinsi Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	1	Kab. Lingga	C
					2	Kab. Kep. Anambas	C
					3	Kota Batam	A
					4	Kab. Karimun	C
					5	Kota Tanjung Pinang	B
					6	Kab. Bintan	C
					7	Kab. Natuna	C
7.	Kantor Wilayah Sumatera Selatan	A	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	1	Kab. Banyuasin	B
					2	Kab. Empat Lawang	C
					3	Kab. Lahat	C
					4	Kab. Muara Enim	B
					5	Kab. Musi Banyuasin	B
					6	Kab. Musi Rawas	C
					7	Kab. Musi Rawas Utara	C
					8	Kab. Ogan Hilir	B
					9	Kab. Ogan Komering Ilir	B
					10	Kab. Ogan Komering Ulu	B
					11	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	C
					12	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	B

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					13	Kota Lubuk Linggau	B
					14	Kota Pagar Alam	C
					15	Kota Palembang	A
					16	Kota Prabumulih	B
8.	Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	B	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Belitung	1	Kab. Bangka Barat	C
					2	Kab. Belitung Timur	C
					3	Kab. Belitung	C
					4	Kab. Bangka Selatan	B
					5	Kota Pangkalpinang	B
					6	Kab. Bangka	B
					7	Kab. Bangka Tengah	C
9.	Kantor Wilayah Bengkulu	B	Provinsi Bengkulu	Bengkulu	1	Kab. Seluma	C
					2	Kab. Kepahiang	C
					3	Kab. Lebong	C
					4	Kab. Bengkulu Selatan	C
					5	Kab. Bengkulu Tengah	C
					6	Kab. Rejang Lebong	C
					7	Kab. Kaur	C
					8	Kota Bengkulu	B
					9	Kab. Bengkulu Utara	C
					10	Kab. Mukomuko	C
10.	Kantor Wilayah Lampung	B	Provinsi Lampung	Lampung	1	Kab. Lampung Tengah	B
					2	Kab. Lampung Timur	B
					3	Kab. Way Kanan	C
					4	Kab. Lampung Barat	B

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					5	Kab. Pesawaran	B
					6	Kota Bandar Lampung	A
					7	Kab. Tulang Bawang Barat	C
					8	Kab. Pringsewu	B
					9	Kab. Tulang Bawang	C
					10	Kota Metro	B
					11	Kab. Mesuji	C
					12	Kab. Pesisir Barat	C
					13	Kab. Lampung Selatan	B
					14	Kab. Lampung Utara	B
					15	Kab. Tanggamus	B
11.	Kantor Wilayah Banten	A	Provinsi Banten	Banten	1	Kab. Tangerang	A
					2	Kota Tangerang Selatan	A
					3	Kab. Serang	A
					4	Kota Serang	A
					5	Kota Cilegon	B
					6	Kab. Pandeglang	B
					7	Kab. Lebak	B
					8	Kota Tangerang	A
12.	Kantor Wilayah DKI Jakarta	A	Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta	1	Kota Administrasi Jakarta Selatan	A
					2	Kota Administrasi Jakarta Barat	A

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.	Kantor Wilayah Jawa Barat	A	Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	3	Kota Administrasi Jakarta Utara	A
					4	Kota Administrasi Jakarta Pusat	A
					5	Kab. Administrasi Kepulauan Seribu	C
					6	Kota Administrasi Jakarta Timur	A
					1	Kab. Bogor	A
					2	Kota Bekasi	A
					3	Kota Bandung	A
					4	Kab. Bandung	A
					5	Kota Depok	A
					6	Kab. Garut	B
					7	Kab. Cianjur	B
					8	Kab. Majalengka	B
					9	Kab. Bandung Barat	A
					10	Kota Bogor	A
					11	Kab. Ciamis	B
					12	Kota Tasikmalaya	B
					13	Kota Cimahi	A
					14	Kab. Bekasi	A
					15	Kab. Cirebon	A
					16	Kab. Karawang	A
					17	Kab. Subang	B

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14.	Kantor Wilayah Jawa Tengah	A	Provinsi Jawa Tengah	Jawa Tengah	18	Kab. Tasikmalaya	B
					19	Kota Sukabumi	B
					20	Kab. Kuningan	B
					21	Kab. Pangandaran	C
					22	Kab. Purwakarta	B
					23	Kab. Sumedang	B
					24	Kota Banjar	C
					25	Kab. Indramayu	A
					26	Kab. Sukabumi	B
					27	Kota Cirebon	B
14.	Kantor Wilayah Jawa Tengah	A	Provinsi Jawa Tengah	Jawa Tengah	1	Kab. Demak	A
					2	Kab. Kebumen	B
					3	Kab. Pemalang	A
					4	Kota Magelang	B
					5	Kab. Banyumas	A
					6	Kab. Brebes	B
					7	Kab. Tegal	A
					8	Kota Semarang	A
					9	Kab. Cilacap	A
					10	Kab. Pekalongan	A
					11	Kab. Rembang	B
					12	Kab. Sragen	A
					13	Kab. Batang	B
					14	Kab. Blora	B
					15	Kab. Boyolali	A

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					16	Kab. Jepara	A
					17	Kab. Temanggung	B
					18	Kab. Wonogiri	B
					19	Kab. Banjarnegara	B
					20	Kab. Karanganyar	A
					21	Kab. Kendal	A
					22	Kab. Magelang	A
					23	Kab. Pati	A
					24	Kota Tegal	C
					25	Kab. Klaten	A
					26	Kab. Grobogan	A
					27	Kab. Kudus	A
					28	Kab. Purworejo	B
					29	Kab. Semarang	A
					30	Kab. Sukoharjo	A
					31	Kab. Wonosobo	B
					32	Kab. Purbalingga	B
					33	Kota Pekalongan	B
					34	Kota Salatiga	B
					35	Kota Surakarta	A
15.	Kantor Wilayah DI Yogyakarta	A	Provinsi DI Yogyakarta	DI Yogyakarta	1	Kab. Sleman	A
					2	Kota Yogyakarta	A
					3	Kab. Bantul	A
					4	Kab. Gunungkidul	B
					5	Kab. Kulon Progo	B

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.	Kantor Wilayah Jawa Timur	A	Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur	1	Kota Surabaya	A
					2	Kab. Lamongan	A
					3	Kab. Bojonegoro	A
					4	Kab. Pasuruan	B
					5	Kab. Kediri	A
					6	Kab. Mojokerto	A
					7	Kab. Ponorogo	B
					8	Kab. Ngawi	B
					9	Kota Pasuruan	C
					10	Kab. Pacitan	C
					11	Kota Madiun	B
					12	Kota Blitar	B
					13	Kab. Jember	A
					14	Kab. Malang	A
					15	Kab. Sidoarjo	A
					16	Kab. Tuban	A
					17	Kab. Lumajang	A
					18	Kab. Pamekasan	A
					19	Kab. Blitar	A
					20	Kab. Tulungagung	A
					21	Kab. Madiun	B
					22	Kab. Probolinggo	A
					23	Kab. Situbondo	B
					24	Kab. Sumenep	A
					25	Kota Batu	B

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.	Kantor Wilayah Bali	B	Provinsi Bali	Bali	26	Kota Malang	A
					27	Kota Kediri	B
					28	Kab. Bangkalan	A
					29	Kab. Gresik	A
					30	Kab. Nganjuk	A
					31	Kab. Trenggalek	B
					32	Kota Probolinggo	B
					33	Kab. Banyuwangi	A
					34	Kab. Bondowoso	B
					35	Kab. Jombang	A
					36	Kab. Magetan	B
					37	Kab. Sampang	B
					38	Kota Mojokerto	C
18.	Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat	A	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	1	Kota Denpasar	B
					2	Kab. Badung	C
					3	Kab. Tabanan	C
					4	Kab. Karangasem	C
					5	Kab. Klungkung	C
					6	Kab. Gianyar	C
					7	Kab. Buleleng	C
					8	Kab. Jembrana	C

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19.	Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur	B	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur	5	Kab. Sumbawa Barat	C
					6	Kab. Lombok Tengah	B
					7	Kab. Lombok Barat	B
					8	Kab. Lombok Timur	B
					9	Kab. Lombok Utara	C
					10	Kota Bima	B
20.	Kantor Wilayah Kalimantan Barat	B	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	1	Kota Kupang	B
					2	Kab. Sikka	C
					3	Kab. Ende	C
					4	Kab. Manggarai	C
					5	Kab. Lembata	C
					6	Kab. Timor Tengah Selatan	C
					7	Kab. Alor	C
					8	Kab. Manggarai Barat	C
					9	Kab. Flores Timur	C
					10	Kab. Belu	C
					1	Kab. Kapuas Hulu	C
					2	Kota Singkawang	C
					3	Kab. Melawi	C
					4	Kab. Kayong Utara	C
					5	Kab. Bengkayang	C
					6	Kab. Sekadau	C
					7	Kab. Landak	C
					8	Kota Pontianak	A

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21.	Kantor Wilayah Kalimantan Tengah	B	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	9	Kab. Sambas	B
					10	Kab. Ketapang	C
					11	Kab. Kubu Raya	B
					12	Kab. Mempawah	C
					13	Kab. Sintang	C
					14	Kab. Sanggau	C
					1	Kab. Kapuas	C
					2	Kota Palangkaraya	B
					3	Kab. Kotawaringin Timur	B
					4	Kab. Barito Utara	C
					5	Kab. Murung Raya	C
					6	Kab. Seruyan	C
					7	Kab. Pulang Pisau	C
					8	Kab. Lamandau	C
22.	Kantor Wilayah Kalimantan Selatan	A	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	9	Kab. Sukamara	C
					10	Kab. Kotawaringin Barat	B
					11	Kab. Barito Timur	C
					12	Kab. Barito Selatan	C
					13	Kab. Katingan	C
					1	Kota Banjarmasin	A
					2	Kab. Banjar	B
					3	Kab. Tabalong	B
					4	Kab. Hulu Sungai Utara	B

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23.	Kantor Wilayah Kalimantan Timur	A	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	5	Kab. Hulu Sungai Selatan	B
					6	Kota Banjarbaru	B
					7	Kab. Tanah Bumbu	B
					8	Kab. Barito Kuala	C
					9	Kab. Kotabaru	B
					10	Kab. Hulu Sungai Tengah	B
					11	Kab. Balangan	C
					12	Kab. Tapin	B
					13	Kab. Tanah Laut	B
					1	Kota Samarinda	A
					2	Kab. Kutai Kartanegara	B
					3	Kota Bontang	B
					4	Kab. Berau	B
24.	Kantor Wilayah Kalimantan Utara	B	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	5	Kab. Kutai Timur	B
					6	Kab. Paser	B
					7	Kab. Kutai Barat	C
					8	Kab. Penajam Paser Utara	B
					9	Kota Balikpapan	A
					1	Kota Tarakan	B
					2	Kab. Malinau	C
					3	Kab. Bulungan	B
					4	Kab. Nunukan	B

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25.	Kantor Wilayah Sulawesi Utara	B	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	1	Kota Manado	C
					2	Kota Bitung	C
					3	Kab. Minahasa	C
					4	Kab. Minahasa Utara	C
					5	Kab. Bolaang Mongondow Utara	C
					6	Kab. Bolaang Mongondow	C
					7	Kota Kotamobagu	C
26.	Kantor Wilayah Gorontalo	B	Provinsi Gorontalo	Gorontalo	1	Kab. Gorontalo Utara	C
					2	Kab. Gorontalo	B
					3	Kota Gorontalo	B
					4	Kab. Bone Bolango	C
					5	Kab. Pohuwato	C
					6	Kab. Boalemo	C
27.	Kantor Wilayah Sulawesi Tengah	B	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	1	Kota Palu	B
					2	Kab. Tolitoli	C
					3	Kab. Poso	C
					4	Kab. Tojo Una Una	C
					5	Kab. Banggai Laut	C
					6	Kab. Buol	C
					7	Kab. Morowali Utara	C
					8	Kab. Donggala	C
					9	Kab. Parigi Moutong	B
					10	Kab. Sigi	C

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28.	Kantor Wilayah Sulawesi Selatan	A	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	11	Kab. Morowali	B
					12	Kab. Banggai Kepulauan	C
					13	Kab. Banggai	B
					1	Kota Makassar	A
					2	Kab. Bone	A
					3	Kab. Gowa	A
					4	Kab. Pinrang	A
					5	Kab. Luwu Utara	B
					6	Kab. Enrekang	C
					7	Kab. Tana Toraja	C
					8	Kab. Wajo	A
					9	Kab. Bulukumba	B
					10	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	B
					11	Kab. Maros	A
					12	Kab. Sidenreng Rappang	A
					13	Kab. Jeneponto	B
					14	Kab. Luwu	C
					15	Kab. Baru	B
					16	Kab. Luwu Timur	B
					17	Kota Palopo	B
					18	Kab. Soppeng	B
					19	Kab. Takalar	B

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29.	Kantor Wilayah Sulawesi Barat	B	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	20	Kab. Bantaeng	B
					21	Kab. Kepulauan Selayar	C
					22	Kab. Sinjai	B
					23	Kab. Toraja Utara	C
					24	Kota Parepare	B
30.	Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara	B	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	1	Kab. Polewali Mandar	B
					2	Kab. Mamuju	B
					3	Kab. Mamasa	C
					4	Kab. Mamuju Tengah	C
					5	Kab. Pasangkayu	C
					6	Kab. Majene	C
					1	Kab. Kolaka Utara	B
					2	Kab. Kolaka Timur	C
					3	Kab. Muna	C
					4	Kab. Konawe Utara	C
					5	Kab. Buton	C
					6	Kab. Buton Tengah	C
					7	Kab. Muna Barat	C
					8	Kab. Konawe Kepulauan	C

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31.	Kantor Wilayah Maluku	B	Provinsi Maluku	Maluku	14	Kota Baubau	C
					15	Kota Kendari	A
					16	Kab. Konawe Selatan	C
					1	Kota Ambon	B
					2	Kab. Buru	C
					3	Kab. Seram Bagian Timur	C
					4	Kab. Kepulauan Aru	C
					5	Kota Tual	C
					6	Kab. Maluku Tenggara	C
					7	Kab. Buru Selatan	C
32.	Kantor Wilayah Maluku Utara	B	Provinsi Maluku Utara	Maluku Utara	8	Kab. Maluku Tengah	C
					9	Kab. Seram Bagian Barat	C
					1	Kota Ternate	B
					2	Kab. Halmahera Selatan	C
					3	Kota Tidore Kepulauan	C
					4	Kab. Halmahera Utara	C
					5	Kab. Kepulauan Sula	C
					6	Kab. Halmahera Tengah	C
					7	Kab. Halmahera Timur	C
					8	Kab. Pulau Taliabu	C
33.		B	Provinsi Papua	Papua	9	Kab. Pulau Morotai	C
					10	Kab. Halmahera Barat	C
					1	Kab. Mimika	C

No	Nama Kantor Wilayah	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			
				Provinsi	No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kantor Wilayah Papua				2	Kab. Merauke	C
					3	Kab. Nabire	C
					4	Kab. Jayapura	C
					5	Kab. Jayawijaya	C
					6	Kab. Biak Numfor	C
					7	Kab. Kepulauan Yapen	C
					8	Kab. Keerom	C
					9	Kab. Asmat	C
					10	Kab. Boven Digoel	C
					11	Kota Jayapura	B
34.	Kantor Wilayah Papua Barat	B	Provinsi Papua Barat	Papua Barat	1	Kota Sorong	C
					2	Kab. Sorong	C
					3	Kab. Kaimana	C
					4	Kab. Sorong Selatan	C
					5	Kab. Manokwari	C
					6	Kab. Raja Ampat	C
					7	Kab. Teluk Bintuni	C
					8	Kab. Fakfak	C

DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, DAN TIPE KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN/KOTA

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kab. Bireuen	B	Provinsi Aceh	Kab. Bireuen	Kab. Bireuen
2.	Kab. Aceh Timur	B	Provinsi Aceh	Kab. Aceh Timur	Kab. Aceh Timur
3.	Kab. Aceh Tamiang	C	Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Kab. Aceh Tamiang
4.	Kab. Aceh Selatan	B	Provinsi Aceh	Kab. Aceh Selatan	Kab. Aceh Selatan
5.	Kab. Nagan Raya	B	Provinsi Aceh	Kab. Nagan Raya	Kab. Nagan Raya
6.	Kab. Aceh Barat Daya	C	Provinsi Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Kab. Aceh Barat Daya
7.	Kab. Gayo Lues	C	Provinsi Aceh	Kab. Gayo Lues	Kab. Gayo Lues
8.	Kab. Aceh Jaya	C	Provinsi Aceh	Kab. Aceh Jaya	Kab. Aceh Jaya
9.	Kota Sabang	C	Provinsi Aceh	Kota Sabang	Kota Sabang
10.	Kota Subulussalam	C	Provinsi Aceh	Kota Subulussalam	Kota Subulussalam
11.	Kab. Aceh Besar	B	Provinsi Aceh	Kab. Aceh Besar	Kab. Aceh Besar
12.	Kab. Aceh Singkil	C	Provinsi Aceh	Kab. Aceh Singkil	Kab. Aceh Singkil
13.	Kab. Aceh Tengah	B	Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Tengah
14.	Kab. Aceh Utara	B	Provinsi Aceh	Kab. Aceh Utara	Kab. Aceh Utara
15.	Kota Langsa	B	Provinsi Aceh	Kota Langsa	Kota Langsa
16.	Kab. Aceh Barat	B	Provinsi Aceh	Kab. Aceh Barat	Kab. Aceh Barat
17.	Kab. Pidie	B	Provinsi Aceh	Kab. Pidie	Kab. Pidie
18.	Kota Banda Aceh	A	Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh
19.	Kab. Bener Meriah	B	Provinsi Aceh	Kab. Bener Meriah	Kab. Bener Meriah
20.	Kab. Simeulue	C	Provinsi Aceh	Kab. Simeulue	Kab. Simeulue

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	Kota Lhokseumawe	B	Provinsi Aceh	Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe
22.	Kab. Aceh Tenggara	B	Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Kab. Aceh Tenggara
23.	Kab. Pidie Jaya	B	Provinsi Aceh	Kab. Pidie Jaya	Kab. Pidie Jaya
24.	Kab. Deli Serdang	B	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	Kab. Deli Serdang
25.	Kab. Labuhanbatu	B	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu	Kab. Labuhanbatu
26.	Kab. Mandailing Natal	B	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal	Kab. Mandailing Natal
27.	Kab. Langkat	B	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Langkat	Kab. Langkat
28.	Kab. Asahan	B	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Asahan	1. Kab. Asahan 2. Kab. Toba 3. Kab. Tapanuli Utara
29.	Kota Padang Sidempuan	C	Provinsi Sumatera Utara	Kota Padang Sidempuan	Kota Padang Sidempuan
30.	Kota Binjai	B	Provinsi Sumatera Utara	Kota Binjai	Kota Binjai
31.	Kab. Serdang Bedagai	B	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
32.	Kab. Tapanuli Selatan	C	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	Kab. Tapanuli Selatan
33.	Kab. Padang Lawas Utara	C	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara
34.	Kab. Simalungun	B	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Simalungun	Kab. Simalungun

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	Kota Pematangsiantar	C	Provinsi Sumatera Utara	Kota Pematangsiantar	Kota Pematangsiantar
36.	Kota Tebing Tinggi	C	Provinsi Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi
37.	Kota Tanjung Balai	C	Provinsi Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai
38.	Kota Sibolga	C	Provinsi Sumatera Utara	Kota Sibolga	1. Kota Sibolga 2. Kab. Nias Utara 3. Kab. Nias Barat 4. Kab. Nias 5. Kab. Nias Selatan 6. Kota Gunung Sitoli
39.	Kab. Karo	C	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Karo	Kab. Karo
40.	Kab. Dairi	C	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Dairi	1. Kab. Dairi 2. Kab. Pakpak Bharat 3. Kab. Samosir 4. Kab. Humbang Hasundutan
41.	Kab. Padang Lawas	C	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas	Kab. Padang Lawas
42.	Kab. Labuhanbatu Selatan	C	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Selatan	Kab. Labuhanbatu Selatan
43.	Kab. Labuhanbatu Utara	C	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Utara	Kab. Labuhanbatu Utara
44.	Kab. Tapanuli Tengah	C	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	Kab. Tapanuli Tengah

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45.	Kab. Batu Bara	B	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Batu Bara	Kab. Batu Bara
46.	Kota Medan	A	Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan	Kota Medan
47.	Kab. Tanah Datar	B	Provinsi Sumatera Barat	Kab. Tanah Datar	Kab. Tanah Datar
48.	Kota Bukittinggi	B	Provinsi Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi
49.	Kab. Lima Puluh Kota	B	Provinsi Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota
50.	Kab. Solok	B	Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok	Kab. Solok
51.	Kab. Dharmasraya	C	Provinsi Sumatera Barat	Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya
52.	Kota Payakumbuh	C	Provinsi Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh
53.	Kab. Pesisir Selatan	C	Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan
54.	Kota Solok	C	Provinsi Sumatera Barat	Kota Solok	Kota Solok
55.	Kab. Sijunjung	C	Provinsi Sumatera Barat	Kab. Sijunjung	Kab. Sijunjung
56.	Kab. Solok Selatan	C	Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan	Kab. Solok Selatan
57.	Kota Padang	A	Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang	1. Kota Padang

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					2. Kab. Kepulauan Mentawai
58.	Kota Pariaman	C	Provinsi Sumatera Barat	Kota Pariaman	Kota Pariaman
59.	Kab. Padang Pariaman	B	Provinsi Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	Kab. Padang Pariaman
60.	Kab. Pasaman	C	Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pasaman	Kab. Pasaman
61.	Kota Padang Panjang	C	Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang
62.	Kab. Agam	B	Provinsi Sumatera Barat	Kab. Agam	Kab. Agam
63.	Kab. Pasaman Barat	B	Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	Kab. Pasaman Barat
64.	Kota Sawahlunto	C	Provinsi Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	Kota Sawahlunto
65.	Kota Pekanbaru	A	Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru
66.	Kab. Indragiri Hilir	B	Provinsi Riau	Kab. Indragiri Hilir	Kab. Indragiri Hilir
67.	Kab. Kepulauan Meranti	C	Provinsi Riau	Kab. Kepulauan Meranti	Kab. Kepulauan Meranti
68.	Kab. Indragiri Hulu	B	Provinsi Riau	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Indragiri Hulu
69.	Kab. Bengkalis	B	Provinsi Riau	Kab. Bengkalis	Kab. Bengkalis
70.	Kab. Kuantan Singingi	C	Provinsi Riau	Kab. Kuantan Singingi	Kab. Kuantan Singingi
71.	Kab. Kampar	A	Provinsi Riau	Kab. Kampar	Kab. Kampar
72.	Kab. Rokan Hilir	B	Provinsi Riau	Kab. Rokan Hilir	Kab. Rokan Hilir

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
73.	Kab. Rokan Hulu	B	Provinsi Riau	Kab. Rokan Hulu	Kab. Rokan Hulu
74.	Kab. Pelalawan	B	Provinsi Riau	Kab. Pelalawan	Kab. Pelalawan
75.	Kab. Siak	B	Provinsi Riau	Kab. Siak	Kab. Siak
76.	Kota Dumai	B	Provinsi Riau	Kota Dumai	Kota Dumai
77.	Kab. Lingga	C	Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Lingga	Kab. Lingga
78.	Kab. Kep. Anambas	C	Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Kep. Anambas	Kab. Kep. Anambas
79.	Kota Batam	A	Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam	Kota Batam
80.	Kab. Karimun	C	Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Karimun	Kab. Karimun
81.	Kota Tanjung Pinang	B	Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	Kota Tanjung Pinang
82.	Kab. Bintan	C	Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Bintan	Kab. Bintan
83.	Kab. Natuna	C	Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna	Kab. Natuna
84.	Kota Jambi	A	Provinsi Jambi	Kota Jambi	Kota Jambi
85.	Kab. Tanjung Jabung Barat	B	Provinsi Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjung Jabung Barat
86.	Kab. Muaro Jambi	B	Provinsi Jambi	Kab. Muaro Jambi	Kab. Muaro Jambi
87.	Kab. Tanjung Jabung Timur	C	Provinsi Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Kab. Tanjung Jabung Timur
88.	Kota Sungai Penuh	C	Provinsi Jambi	Kota Sungai Penuh	Kota Sungai Penuh

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
89.	Kab. Batanghari	B	Provinsi Jambi	Kab. Batanghari	Kab. Batanghari
90.	Kab. Bungo	B	Provinsi Jambi	Kab. Bungo	Kab. Bungo
91.	Kab. Kerinci	B	Provinsi Jambi	Kab. Kerinci	Kab. Kerinci
92.	Kab. Merangin	B	Provinsi Jambi	Kab. Merangin	Kab. Merangin
93.	Kab. Sarolangun	B	Provinsi Jambi	Kab. Sarolangun	Kab. Sarolangun
94.	Kab. Tebo	C	Provinsi Jambi	Kab. Tebo	Kab. Tebo
95.	Kab. Seluma	C	Provinsi Bengkulu	Kab. Seluma	Kab. Seluma
96.	Kab. Kepahiang	C	Provinsi Bengkulu	Kab. Kepahiang	Kab. Kepahiang
97.	Kab. Lebong	C	Provinsi Bengkulu	Kab. Lebong	Kab. Lebong
98.	Kab. Bengkulu Selatan	C	Provinsi Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Kab. Bengkulu Selatan
99.	Kab. Bengkulu Tengah	C	Provinsi Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Kab. Bengkulu Tengah
100.	Kab. Rejang Lebong	C	Provinsi Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Kab. Rejang Lebong
101.	Kab. Kaur	C	Provinsi Bengkulu	Kab. Kaur	Kab. Kaur
102.	Kota Bengkulu	B	Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
103.	Kab. Bengkulu Utara	C	Provinsi Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Kab. Bengkulu Utara

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
104.	Kab. Mukomuko	C	Provinsi Bengkulu	Kab. Mukomuko	Kab. Mukomuko
105.	Kab. Bangka Barat	C	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Barat
106.	Kab. Belitung Timur	C	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	Kab. Belitung Timur
107.	Kab. Belitung	C	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung	Kab. Belitung
108.	Kab. Bangka Selatan	B	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	Kab. Bangka Selatan
109.	Kota Pangkalpinang	B	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang
110.	Kab. Bangka	B	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka	Kab. Bangka
111.	Kab. Bangka Tengah	C	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	Kab. Bangka Tengah
112.	Kab. Banyuasin	B	Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	Kab. Banyuasin

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
113.	Kab. Empat Lawang	C	Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Empat Lawang	Kab. Empat Lawang
114.	Kab. Lahat	C	Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Lahat	Kab. Lahat
115.	Kab. Muara Enim	B	Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	1. Kab. Muara Enim 2. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
116.	Kab. Musi Banyuasin	B	Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin
117.	Kab. Musi Rawas	C	Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
118.	Kab. Musi Rawas Utara	C	Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara	Kab. Musi Rawas Utara
119.	Kab. Ogan Hilir	B	Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Hilir	Kab. Ogan Hilir
120.	Kab. Ogan Komering Ilir	B	Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir	Kab. Ogan Komering Ilir
121.	Kab. Ogan Komering Ulu	B	Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu	Kab. Ogan Komering Ulu

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
122.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	C	Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
123.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	B	Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
124.	Kota Lubuk Linggau	B	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Lubuk Linggau	Kota Lubuk Linggau
125.	Kota Pagar Alam	C	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	Kota Pagar Alam
126.	Kota Palembang	A	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang	Kota Palembang
127.	Kota Prabumulih	B	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	Kota Prabumulih
128.	Kab. Lampung Tengah	B	Provinsi Lampung	Kab. Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah
129.	Kab. Lampung Timur	B	Provinsi Lampung	Kab. Lampung Timur	Kab. Lampung Timur
130.	Kab. Way Kanan	C	Provinsi Lampung	Kab. Way Kanan	Kab. Way Kanan
131.	Kab. Lampung Barat	B	Provinsi Lampung	Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung Barat

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
132.	Kab. Pesawaran	B	Provinsi Lampung	Kab. Pesawaran	Kab. Pesawaran
133.	Kota Bandar Lampung	A	Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung
134.	Kab. Tulang Bawang Barat	C	Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Kab. Tulang Bawang Barat
135.	Kab. Pringsewu	B	Provinsi Lampung	Kab. Pringsewu	Kab. Pringsewu
136.	Kab. Tulang Bawang	C	Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang	Kab. Tulang Bawang
137.	Kota Metro	B	Provinsi Lampung	Kota Metro	Kota Metro
138.	Kab. Mesuji	C	Provinsi Lampung	Kab. Mesuji	Kab. Mesuji
139.	Kab. Pesisir Barat	C	Provinsi Lampung	Kab. Pesisir Barat	Kab. Pesisir Barat
140.	Kab. Lampung Selatan	B	Provinsi Lampung	Kab. Lampung Selatan	Kab. Lampung Selatan
141.	Kab. Lampung Utara	B	Provinsi Lampung	Kab. Lampung Utara	Kab. Lampung Utara
142.	Kab. Tanggamus	B	Provinsi Lampung	Kab. Tanggamus	Kab. Tanggamus
143.	Kab. Tangerang	A	Provinsi Banten	Kab. Tangerang	Kab. Tangerang
144.	Kota Tangerang Selatan	A	Provinsi Banten	Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan
145.	Kab. Serang	A	Provinsi Banten	Kab. Serang	Kab. Serang

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
146.	Kota Serang	A	Provinsi Banten	Kota Serang	Kota Serang
147.	Kota Cilegon	B	Provinsi Banten	Kota Cilegon	Kota Cilegon
148.	Kab. Pandeglang	B	Provinsi Banten	Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang
149.	Kab. Lebak	B	Provinsi Banten	Kab. Lebak	Kab. Lebak
150.	Kota Tangerang	A	Provinsi Banten	Kota Tangerang	Kota Tangerang
151.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	A	Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
152.	Kota Administrasi Jakarta Barat	A	Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat
153.	Kota Administrasi Jakarta Utara	A	Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara
154.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	A	Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat
155.	Kab. Administrasi Kepulauan Seribu	C	Provinsi DKI Jakarta	Kab. Administrasi Kepulauan Seribu	Kab. Administrasi Kepulauan Seribu
156.	Kota Administrasi Jakarta Timur	A	Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur
157.	Kab. Bogor	A	Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor	Kab. Bogor
158.	Kota Bekasi	A	Provinsi Jawa Barat	Kota Bekasi	Kota Bekasi
159.	Kota Bandung	A	Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	Kota Bandung
160.	Kab. Bandung	A	Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung	Kab. Bandung

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
161.	Kota Depok	A	Provinsi Jawa Barat	Kota Depok	Kota Depok
162.	Kab. Garut	B	Provinsi Jawa Barat	Kab. Garut	Kab. Garut
163.	Kab. Cianjur	B	Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur	Kab. Cianjur
164.	Kab. Majalengka	B	Provinsi Jawa Barat	Kab. Majalengka	Kab. Majalengka
165.	Kab. Bandung Barat	A	Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung Barat	Kab. Bandung Barat
166.	Kota Bogor	A	Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor	Kota Bogor
167.	Kab. Ciamis	B	Provinsi Jawa Barat	Kab. Ciamis	Kab. Ciamis
168.	Kota Tasikmalaya	B	Provinsi Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya
169.	Kota Cimahi	A	Provinsi Jawa Barat	Kota Cimahi	Kota Cimahi
170.	Kab. Bekasi	A	Provinsi Jawa Barat	Kab. Bekasi	Kab. Bekasi
171.	Kab. Cirebon	A	Provinsi Jawa Barat	Kab. Cirebon	Kab. Cirebon
172.	Kab. Karawang	A	Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang	Kab. Karawang
173.	Kab. Subang	B	Provinsi Jawa Barat	Kab. Subang	Kab. Subang

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
174.	Kab. Tasikmalaya	B	Provinsi Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	Kab. Tasikmalaya
175.	Kota Sukabumi	B	Provinsi Jawa Barat	Kota Sukabumi	Kota Sukabumi
176.	Kab. Kuningan	B	Provinsi Jawa Barat	Kab. Kuningan	Kab. Kuningan
177.	Kab. Pangandaran	C	Provinsi Jawa Barat	Kab. Pangandaran	Kab. Pangandaran
178.	Kab. Purwakarta	B	Provinsi Jawa Barat	Kab. Purwakarta	Kab. Purwakarta
179.	Kab. Sumedang	B	Provinsi Jawa Barat	Kab. Sumedang	Kab. Sumedang
180.	Kota Banjar	C	Provinsi Jawa Barat	Kota Banjar	Kota Banjar
181.	Kab. Indramayu	A	Provinsi Jawa Barat	Kab. Indramayu	Kab. Indramayu
182.	Kab. Sukabumi	B	Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi	Kab. Sukabumi
183.	Kota Cirebon	B	Provinsi Jawa Barat	Kota Cirebon	Kota Cirebon
184.	Kab. Demak	A	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Demak	Kab. Demak
185.	Kab. Kebumen	B	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kebumen	Kab. Kebumen
186.	Kab. Pemalang	A	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pemalang	Kab. Pemalang

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
187.	Kota Magelang	B	Provinsi Jawa Tengah	Kota Magelang	Kota Magelang
188.	Kab. Banyumas	A	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banyumas	Kab. Banyumas
189.	Kab. Brebes	B	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Brebes	Kab. Brebes
190.	Kab. Tegal	A	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Tegal	Kab. Tegal
191.	Kota Semarang	A	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	Kota Semarang
192.	Kab. Cilacap	A	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap	Kab. Cilacap
193.	Kab. Pekalongan	A	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	Kab. Pekalongan
194.	Kab. Rembang	B	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Rembang	Kab. Rembang
195.	Kab. Sragen	A	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Sragen	Kab. Sragen
196.	Kab. Batang	B	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Batang	Kab. Batang
197.	Kab. Blora	B	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Blora	Kab. Blora
198.	Kab. Boyolali	A	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Boyolali	Kab. Boyolali
199.	Kab. Jepara	A	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Jepara	Kab. Jepara

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
200.	Kab. Temanggung	B	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Temanggung	Kab. Temanggung
201.	Kab. Wonogiri	B	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	Kab. Wonogiri
202.	Kab. Banjarnegara	B	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	Kab. Banjarnegara
203.	Kab. Karanganyar	A	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	Kab. Karanganyar
204.	Kab. Kendal	A	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kendal	Kab. Kendal
205.	Kab. Magelang	A	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Magelang	Kab. Magelang
206.	Kab. Pati	A	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pati	Kab. Pati
207.	Kota Tegal	C	Provinsi Jawa Tengah	Kota Tegal	Kota Tegal
208.	Kab. Klaten	A	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Klaten	Kab. Klaten
209.	Kab. Grobogan	A	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Grobogan	Kab. Grobogan
210.	Kab. Kudus	A	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kudus	Kab. Kudus
211.	Kab. Purworejo	B	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo
212.	Kab. Semarang	A	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Semarang	Kab. Semarang

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
213.	Kab. Sukoharjo	A	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	Kab. Sukoharjo
214.	Kab. Wonosobo	B	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	Kab. Wonosobo
215.	Kab. Purbalingga	B	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga
216.	Kota Pekalongan	B	Provinsi Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Kota Pekalongan
217.	Kota Salatiga	B	Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga	Kota Salatiga
218.	Kota Surakarta	A	Provinsi Jawa Tengah	Kota Surakarta	Kota Surakarta
219.	Kab. Sleman	A	Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Sleman	Kab. Sleman
220.	Kota Yogyakarta	A	Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta
221.	Kab. Bantul	A	Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Bantul	Kab. Bantul
222.	Kab. Gunungkidul	B	Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul
223.	Kab. Kulon Progo	B	Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Kab. Kulon Progo
224.	Kota Surabaya	A	Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya	Kota Surabaya
225.	Kab. Lamongan	A	Provinsi Jawa Timur	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
226.	Kab. Bojonegoro	A	Provinsi Jawa Timur	Kab. Bojonegoro	Kab. Bojonegoro
227.	Kab. Pasuruan	B	Provinsi Jawa Timur	Kab. Pasuruan	Kab. Pasuruan
228.	Kab. Kediri	A	Provinsi Jawa Timur	Kab. Kediri	Kab. Kediri
229.	Kab. Mojokerto	A	Provinsi Jawa Timur	Kab. Mojokerto	Kab. Mojokerto
230.	Kab. Ponorogo	B	Provinsi Jawa Timur	Kab. Ponorogo	Kab. Ponorogo
231.	Kab. Ngawi	B	Provinsi Jawa Timur	Kab. Ngawi	Kab. Ngawi
232.	Kota Pasuruan	C	Provinsi Jawa Timur	Kota Pasuruan	Kota Pasuruan
233.	Kab. Pacitan	C	Provinsi Jawa Timur	Kab. Pacitan	Kab. Pacitan
234.	Kota Madiun	B	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun	Kota Madiun
235.	Kota Blitar	B	Provinsi Jawa Timur	Kota Blitar	Kota Blitar
236.	Kab. Jember	A	Provinsi Jawa Timur	Kab. Jember	Kab. Jember
237.	Kab. Malang	A	Provinsi Jawa Timur	Kab. Malang	Kab. Malang
238.	Kab. Sidoarjo	A	Provinsi Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	Kab. Sidoarjo

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
239.	Kab. Tuban	A	Provinsi Jawa Timur	Kab. Tuban	Kab. Tuban
240.	Kab. Lumajang	A	Provinsi Jawa Timur	Kab. Lumajang	Kab. Lumajang
241.	Kab. Pamekasan	A	Provinsi Jawa Timur	Kab. Pamekasan	Kab. Pamekasan
242.	Kab. Blitar	A	Provinsi Jawa Timur	Kab. Blitar	Kab. Blitar
243.	Kab. Tulungagung	A	Provinsi Jawa Timur	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung
244.	Kab. Madiun	B	Provinsi Jawa Timur	Kab. Madiun	Kab. Madiun
245.	Kab. Probolinggo	A	Provinsi Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Kab. Probolinggo
246.	Kab. Situbondo	B	Provinsi Jawa Timur	Kab. Situbondo	Kab. Situbondo
247.	Kab. Sumenep	A	Provinsi Jawa Timur	Kab. Sumenep	Kab. Sumenep
248.	Kota Batu	B	Provinsi Jawa Timur	Kota Batu	Kota Batu
249.	Kota Malang	A	Provinsi Jawa Timur	Kota Malang	Kota Malang
250.	Kota Kediri	B	Provinsi Jawa Timur	Kota Kediri	Kota Kediri
251.	Kab. Bangkalan	A	Provinsi Jawa Timur	Kab. Bangkalan	Kab. Bangkalan

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
252.	Kab. Gresik	A	Provinsi Jawa Timur	Kab. Gresik	Kab. Gresik
253.	Kab. Nganjuk	A	Provinsi Jawa Timur	Kab. Nganjuk	Kab. Nganjuk
254.	Kab. Trenggalek	B	Provinsi Jawa Timur	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek
255.	Kota Probolinggo	B	Provinsi Jawa Timur	Kota Probolinggo	Kota Probolinggo
256.	Kab. Banyuwangi	A	Provinsi Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	Kab. Banyuwangi
257.	Kab. Bondowoso	B	Provinsi Jawa Timur	Kab. Bondowoso	Kab. Bondowoso
258.	Kab. Jombang	A	Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang	Kab. Jombang
259.	Kab. Magetan	B	Provinsi Jawa Timur	Kab. Magetan	Kab. Magetan
260.	Kab. Sampang	B	Provinsi Jawa Timur	Kab. Sampang	Kab. Sampang
261.	Kota Mojokerto	C	Provinsi Jawa Timur	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto
262.	Kota Denpasar	B	Provinsi Bali	Kota Denpasar	Kota Denpasar
263.	Kab. Badung	C	Provinsi Bali	Kab. Badung	Kab. Badung
264.	Kab. Tabanan	C	Provinsi Bali	Kab. Tabanan	Kab. Tabanan
265.	Kab. Karangasem	C	Provinsi Bali	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem
266.	Kab. Klungkung	C	Provinsi Bali	Kab. Klungkung	Kab. Klungkung

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
267.	Kab. Gianyar	C	Provinsi Bali	Kab. Gianyar	1. Kab. Gianyar 2. Kab. Bangli
268.	Kab. Buleleng	C	Provinsi Bali	Kab. Buleleng	Kab. Buleleng
269.	Kab. Jembrana	C	Provinsi Bali	Kab. Jembrana	Kab. Jembrana
270.	Kab. Bima	C	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	Kab. Bima
271.	Kota Mataram	A	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	Kota Mataram
272.	Kab. Sumbawa	B	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	Kab. Sumbawa
273.	Kab. Dompu	C	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	Kab. Dompu
274.	Kab. Sumbawa Barat	C	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Sumbawa Barat
275.	Kab. Lombok Tengah	B	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Tengah
276.	Kab. Lombok Barat	B	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Barat
277.	Kab. Lombok Timur	B	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Timur
278.	Kab. Lombok Utara	C	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara	Kab. Lombok Utara
279.	Kota Bima	B	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Kota Bima
280.	Kota Kupang	B	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	1. Kota Kupang 2. Kab. Kupang

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					3. Kab. Rote Ndao 4. Kab. Malaka 5. Kab. Sabu Raijua
281.	Kab. Sikka	C	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	Kab. Sikka
282.	Kab. Ende	C	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1. Kab. Ende 2. Kab. Nageko
283.	Kab. Manggarai	C	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	1. Kab. Manggarai 2. Kab. Sumba Timur 3. Kab. Sumba Barat 4. Kab. Sumba Barat Daya 5. Kab. Sumba Tengah 6. Kab. Manggarai Timur 7. Kab. Ngada
284.	Kab. Lembata	C	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	Kab. Lembata
285.	Kab. Timor Tengah Selatan	C	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan
286.	Kab. Alor	C	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	Kab. Alor
287.	Kab. Manggarai Barat	C	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	Kab. Manggarai Barat
288.	Kab. Flores Timur	C	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	Kab. Flores Timur
289.	Kab. Belu	C	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	1. Kab. Belu

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					2. Kab. Timor Tengah Utara
290.	Kab. Kapuas Hulu	C	Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu
291.	Kota Singkawang	C	Provinsi Kalimantan Barat	Kota Singkawang	Kota Singkawang
292.	Kab. Melawi	C	Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Melawi	Kab. Melawi
293.	Kab. Kayong Utara	C	Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	Kab. Kayong Utara
294.	Kab. Bengkayang	C	Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	Kab. Bengkayang
295.	Kab. Sekadau	C	Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sekadau	Kab. Sekadau
296.	Kab. Landak	C	Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Landak	Kab. Landak
297.	Kota Pontianak	A	Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Kota Pontianak

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
298.	Kab. Sambas	B	Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sambas	Kab. Sambas
299.	Kab. Ketapang	C	Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	Kab. Ketapang
300.	Kab. Kubu Raya	B	Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya	Kab. Kubu Raya
301.	Kab. Mempawah	C	Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Mempawah	Kab. Mempawah
302.	Kab. Sintang	C	Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sintang	Kab. Sintang
303.	Kab. Sanggau	C	Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau
304.	Kota Banjarmasin	A	Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin
305.	Kab. Banjar	B	Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Banjar	Kab. Banjar
306.	Kab. Tabalong	B	Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	Kab. Tabalong

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
307.	Kab. Hulu Sungai Utara	B	Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	Kab. Hulu Sungai Utara
308.	Kab. Hulu Sungai Selatan	B	Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan
309.	Kota Banjarbaru	B	Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru
310.	Kab. Tanah Bumbu	B	Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Tanah Bumbu
311.	Kab. Barito Kuala	C	Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Barito Kuala	Kab. Barito Kuala
312.	Kab. Kotabaru	B	Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	Kab. Kotabaru
313.	Kab. Hulu Sungai Tengah	B	Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah
314.	Kab. Balangan	C	Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Balangan	Kab. Balangan
315.	Kab. Tapin	B	Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	Kab. Tapin

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
316.	Kab. Tanah Laut	B	Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	Kab. Tanah Laut
317.	Kab. Kapuas	C	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	Kab. Kapuas
318.	Kota Palangkaraya	B	Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	1. Kota Palangkaraya 2. Kab. Gunung Mas
319.	Kab. Kotawaringin Timur	B	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	Kab. Kotawaringin Timur
320.	Kab. Barito Utara	C	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	Kab. Barito Utara
321.	Kab. Murung Raya	C	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Murung Raya	Kab. Murung Raya
322.	Kab. Seruyan	C	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	Kab. Seruyan
323.	Kab. Pulang Pisau	C	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	Kab. Pulang Pisau
324.	Kab. Lamandau	C	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Lamandau	Kab. Lamandau

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
325.	Kab. Sukamara	C	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara	Kab. Sukamara
326.	Kab. Kotawaringin Barat	B	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat
327.	Kab. Barito Timur	C	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur	Kab. Barito Timur
328.	Kab. Barito Selatan	C	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan
329.	Kab. Katingan	C	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	Kab. Katingan
330.	Kota Samarinda	A	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Kota Samarinda
331.	Kab. Kutai Kartanegara	B	Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	Kab. Kutai Kartanegara
332.	Kota Bontang	B	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Bontang	Kota Bontang
333.	Kab. Berau	B	Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Berau	Kab. Berau

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
334.	Kab. Kutai Timur	B	Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur
335.	Kab. Paser	B	Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Paser	Kab. Paser
336.	Kab. Kutai Barat	C	Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	1. Kab. Kutai Barat 2. Kab. Mahakam Ulu
337.	Kab. Penajam Paser Utara	B	Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara	Kab. Penajam Paser Utara
338.	Kota Balikpapan	A	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	Kota Balikpapan
339.	Kota Tarakan	B	Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan	1. Kota Tarakan 2. Kab. Tana Tidung
340.	Kab. Malinau	C	Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Malinau	Kab. Malinau
341.	Kab. Bulungan	B	Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	Kab. Bulungan
342.	Kab. Nunukan	B	Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	Kab. Nunukan

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
343.	Kab. Polewali Mandar	B	Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar	Kab. Polewali Mandar
344.	Kab. Mamuju	B	Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	Kab. Mamuju
345.	Kab. Mamasa	C	Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamasa	Kab. Mamasa
346.	Kab. Mamuju Tengah	C	Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	Kab. Mamuju Tengah
347.	Kab. Pasangkayu	C	Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu	Kab. Pasangkayu
348.	Kab. Majene	C	Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Majene	Kab. Majene
349.	Kota Makassar	A	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar	Kota Makassar
350.	Kab. Bone	A	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone	Kab. Bone
351.	Kab. Gowa	A	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	Kab. Gowa
352.	Kab. Pinrang	A	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	Kab. Pinrang
353.	Kab. Luwu Utara	B	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	Kab. Luwu Utara
354.	Kab. Enrekang	C	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	Kab. Enrekang
355.	Kab. Tana Toraja	C	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	Kab. Tana Toraja

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
356.	Kab. Wajo	A	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	Kab. Wajo
357.	Kab. Bulukumba	B	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba	Kab. Bulukumba
358.	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	B	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Kab. Pangkajene dan Kepulauan
359.	Kab. Maros	A	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Maros	Kab. Maros
360.	Kab. Sidenreng Rappang	A	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang
361.	Kab. Jeneponto	B	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	Kab. Jeneponto
362.	Kab. Luwu	C	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	Kab. Luwu
363.	Kab. Barru	B	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Barru	Kab. Barru
364.	Kab. Luwu Timur	B	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur	Kab. Luwu Timur
365.	Kota Palopo	B	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Palopo	Kota Palopo
366.	Kab. Soppeng	B	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	Kab. Soppeng
367.	Kab. Takalar	B	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	Kab. Takalar
368.	Kab. Bantaeng	B	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	Kab. Bantaeng

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
369.	Kab. Kepulauan Selayar	C	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	Kab. Kepulauan Selayar
370.	Kab. Sinjai	B	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai
371.	Kab. Toraja Utara	C	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara	Kab. Toraja Utara
372.	Kota Parepare	B	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Parepare	Kota Parepare
373.	Kota Palu	B	Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu	Kota Palu
374.	Kab. Tolitoli	C	Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	Kab. Tolitoli
375.	Kab. Poso	C	Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Poso	Kab. Poso
376.	Kab. Tojo Una Una	C	Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	Kab. Tojo Una Una
377.	Kab. Banggai Laut	C	Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Laut	Kab. Banggai Laut
378.	Kab. Buol	C	Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Buol	Kab. Buol
379.	Kab. Morowali Utara	C	Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara	Kab. Morowali Utara
380.	Kab. Donggala	C	Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	Kab. Donggala
381.	Kab. Parigi Moutong	B	Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	Kab. Parigi Moutong

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
382.	Kab. Sigi	C	Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Sigi	Kab. Sigi
383.	Kab. Morowali	B	Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	Kab. Morowali
384.	Kab. Banggai Kepulauan	C	Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan	Kab. Banggai Kepulauan
385.	Kab. Banggai	B	Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	Kab. Banggai
386.	Kab. Kolaka Utara	B	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara	Kab. Kolaka Utara
387.	Kab. Kolaka Timur	C	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur	Kab. Kolaka Timur
388.	Kab. Muna	C	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Muna	Kab. Muna
389.	Kab. Konawe Utara	C	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara	Kab. Konawe Utara
390.	Kab. Buton	C	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	Kab. Buton
391.	Kab. Buton Tengah	C	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Tengah	Kab. Buton Tengah
392.	Kab. Muna Barat	C	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	Kab. Muna Barat
393.	Kab. Konawe Kepulauan	C	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Kepulauan	Kab. Konawe Kepulauan
394.	Kab. Buton Selatan	C	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Selatan	Kab. Buton Selatan

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
395.	Kab. Kolaka	B	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	Kab. Kolaka
396.	Kab. Konawe	B	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	Kab. Konawe
397.	Kab. Bombana	C	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana	Kab. Bombana
398.	Kab. Wakatobi	C	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	Kab. Wakatobi
399.	Kota Baubau	C	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Baubau	1. Kota Baubau 2. Kab. Buton Utara
400.	Kota Kendari	A	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Kota Kendari
401.	Kab. Konawe Selatan	C	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	Kab. Konawe Selatan
402.	Kota Manado	C	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado	1. Kota Manado 2. Kota Tomohon 3. Kab. Kepulauan Talaud 4. Kab. Kepulauan Sitaro 5. Kab. Kepulauan Sangihe
403.	Kota Bitung	C	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung	Kota Bitung
404.	Kab. Minahasa	C	Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	1. Kab. Minahasa 2. Kab. Minahasa Selatan 3. Kab. Minahasa Tenggara

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
405.	Kab. Minahasa Utara	C	Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara	Kab. Minahasa Utara
406.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	C	Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara
407.	Kab. Bolaang Mongondow	C	Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow	1. Kab. Bolaang Mongondow 2. Kab. Bolaang Mongondow Timur 3. Kab. Bolaang Mongondow Selatan
408.	Kota Kotamobagu	C	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu
409.	Kab. Gorontalo Utara	C	Provinsi Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Kab. Gorontalo Utara
410.	Kab. Gorontalo	B	Provinsi Gorontalo	Kab. Gorontalo	Kab. Gorontalo
411.	Kota Gorontalo	B	Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo	Kota Gorontalo
412.	Kab. Bone Bolango	C	Provinsi Gorontalo	Kab. Bone Bolango	Kab. Bone Bolango
413.	Kab. Pohuwato	C	Provinsi Gorontalo	Kab. Pohuwato	Kab. Pohuwato
414.	Kab. Boalemo	C	Provinsi Gorontalo	Kab. Boalemo	Kab. Boalemo
415.	Kota Ambon	B	Provinsi Maluku	Kota Ambon	1. Kota Ambon

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					2. Kab. Maluku Barat Daya 3. Kab. Maluku Tenggara Barat
416.	Kab. Buru	C	Provinsi Maluku	Kab. Buru	Kab. Buru
417.	Kab. Seram Bagian Timur	C	Provinsi Maluku	Kab. Seram Bagian Timur	Kab. Seram Bagian Timur
418.	Kab. Kepulauan Aru	C	Provinsi Maluku	Kab. Kepulauan Aru	Kab. Kepulauan Aru
419.	Kota Tual	C	Provinsi Maluku	Kota Tual	Kota Tual
420.	Kab. Maluku Tenggara	C	Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara	Kab. Maluku Tenggara
421.	Kab. Buru Selatan	C	Provinsi Maluku	Kab. Buru Selatan	Kab. Buru Selatan
422.	Kab. Maluku Tengah	C	Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tengah	Kab. Maluku Tengah
423.	Kab. Seram Bagian Barat	C	Provinsi Maluku	Kab. Seram Bagian Barat	Kab. Seram Bagian Barat
424.	Kota Ternate	B	Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate	Kota Ternate
425.	Kab. Halmahera Selatan	C	Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	Kab. Halmahera Selatan
426.	Kota Tidore Kepulauan	C	Provinsi Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	Kota Tidore Kepulauan
427.	Kab. Halmahera Utara	C	Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	Kab. Halmahera Utara
428.	Kab. Kepulauan Sula	C	Provinsi Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	Kab. Kepulauan Sula

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
429.	Kab. Halmahera Tengah	C	Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah	Kab. Halmahera Tengah
430.	Kab. Halmahera Timur	C	Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	Kab. Halmahera Timur
431.	Kab. Pulau Taliabu	C	Provinsi Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu	Kab. Pulau Taliabu
432.	Kab. Pulau Morotai	C	Provinsi Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	Kab. Pulau Morotai
433.	Kab. Halmahera Barat	C	Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	Kab. Halmahera Barat
434.	Kab. Mimika	C	Provinsi Papua	Kab. Mimika	1. Kab. Mimika 2. Kab. Nduga 3. Kab. Lanny Jaya 4. Kab. Puncak Jaya 5. Kab. Puncak
435.	Kab. Merauke	C	Provinsi Papua	Kab. Merauke	1. Kab. Merauke 2. Kab. Mappi
436.	Kab. Nabire	C	Provinsi Papua	Kab. Nabire	1. Kab. Nabire 2. Kab. Waropen 3. Kab. Paniai 4. Kab. Intan Jaya 5. Kab. Dogiyai 6. Kab. Deiyai
437.	Kab. Jayapura	C	Provinsi Papua	Kab. Jayapura	1. Kab. Jayapura 2. Kab. Sarmi 3. Kab. Yahukimo 4. Kab. Yalimo

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					5. Kab. Mamberamo Tengah 6. Kab. Mamberamo Raya
438.	Kab. Jayawijaya	C	Provinsi Papua	Kab. Jayawijaya	1. Kab. Jayawijaya 2. Kab. Tolikara
439.	Kab. Biak Numfor	C	Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor	1. Kab. Biak Numfor 2. Kab. Supiori
440.	Kab. Kepulauan Yapen	C	Provinsi Papua	Kab. Kepulauan Yapen	Kab. Kepulauan Yapen
441.	Kab. Keerom	C	Provinsi Papua	Kab. Keerom	1. Kab. Keerom 2. Kab. Pegunungan Bintang
442.	Kab. Asmat	C	Provinsi Papua	Kab. Asmat	Kab. Asmat
443.	Kab. Boven Digoel	C	Provinsi Papua	Kab. Boven Digoel	Kab. Boven Digoel
444.	Kota Jayapura	B	Provinsi Papua	Kota Jayapura	Kota Jayapura
445.	Kota Sorong	C	Provinsi Papua Barat	Kota Sorong	1. Kota Sorong 2. Kab. Tambrauw 3. Kab. Maybrat
446.	Kab. Sorong	C	Provinsi Papua Barat	Kab. Sorong	Kab. Sorong
447.	Kab. Kaimana	C	Provinsi Papua Barat	Kab. Kaimana	1. Kab. Kaimana 2. Kab. Teluk Wondama
448.	Kab. Sorong Selatan	C	Provinsi Papua Barat	Kab. Sorong Selatan	Kab. Sorong Selatan
449.	Kab. Manokwari	C	Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari	1. Kab. Manokwari 2. Kab. Manokwari Selatan

No	Nama Kantor Kementerian Kabupaten/Kota	Tipe	Lokasi Kantor	Daerah Administrasi Pemerintahan	Wilayah Kerja
					Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					3. Kab. Pegunungan Arfak
450.	Kab. Raja Ampat	C	Provinsi Papua Barat	Kab. Raja Ampat	Kab. Raja Ampat
451.	Kab. Teluk Bintuni	C	Provinsi Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	Kab. Teluk Bintuni
452.	Kab. Fakfak	C	Provinsi Papua Barat	Kab. Fakfak	Kab. Fakfak

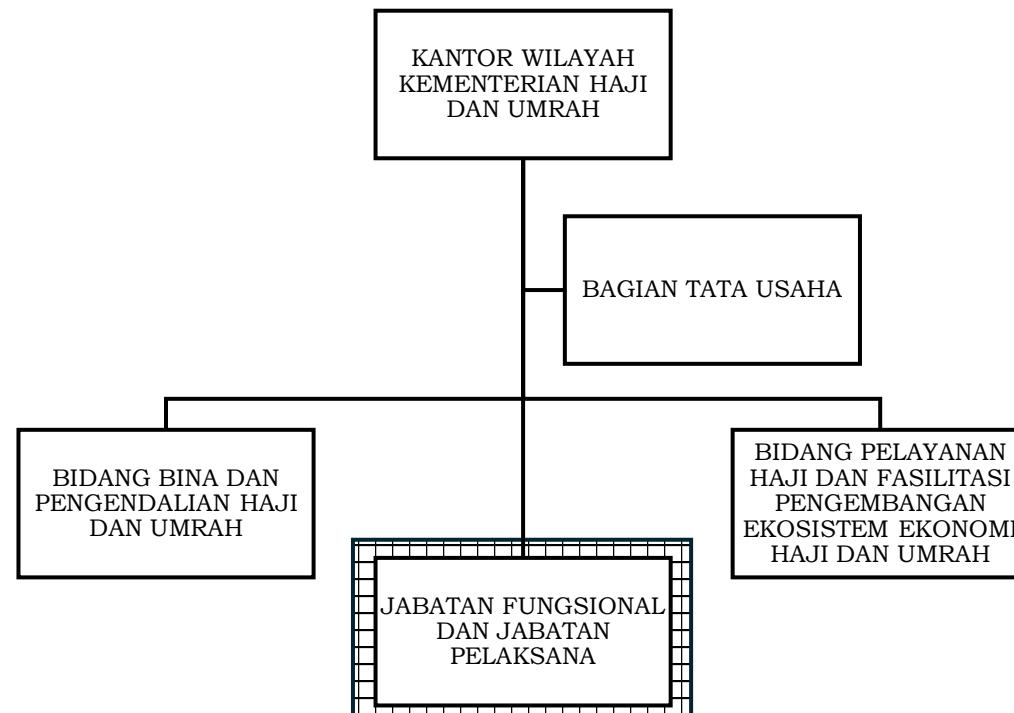
MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

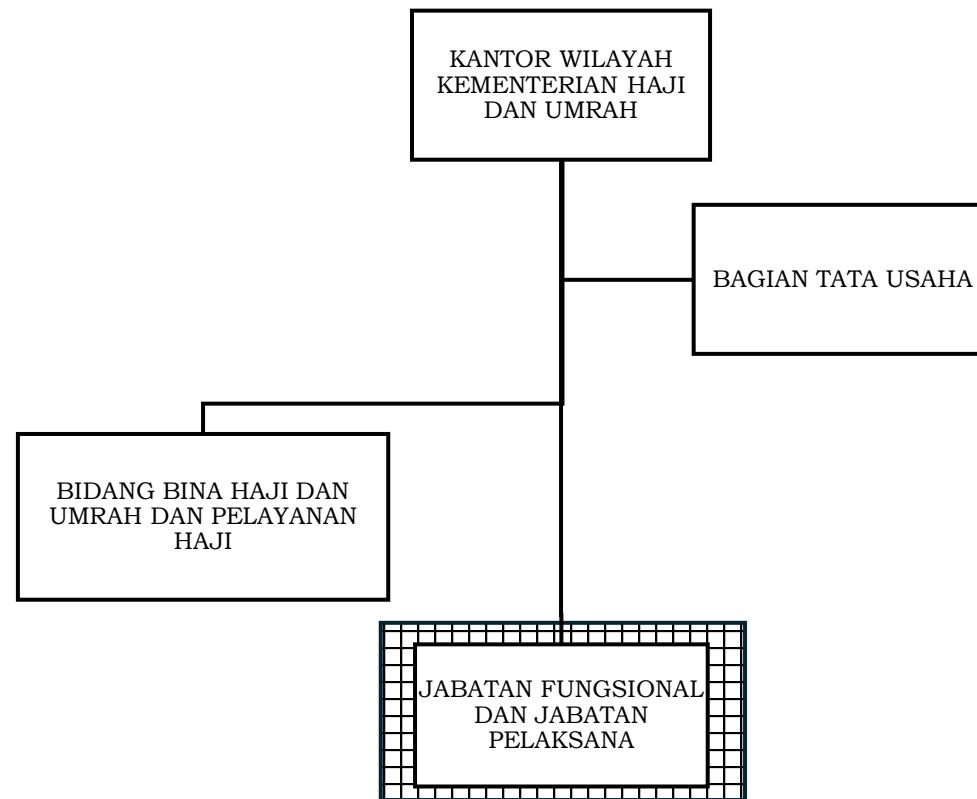
MOCHAMAD IRFAN YUSUF

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN
HAJI DAN UMRAH

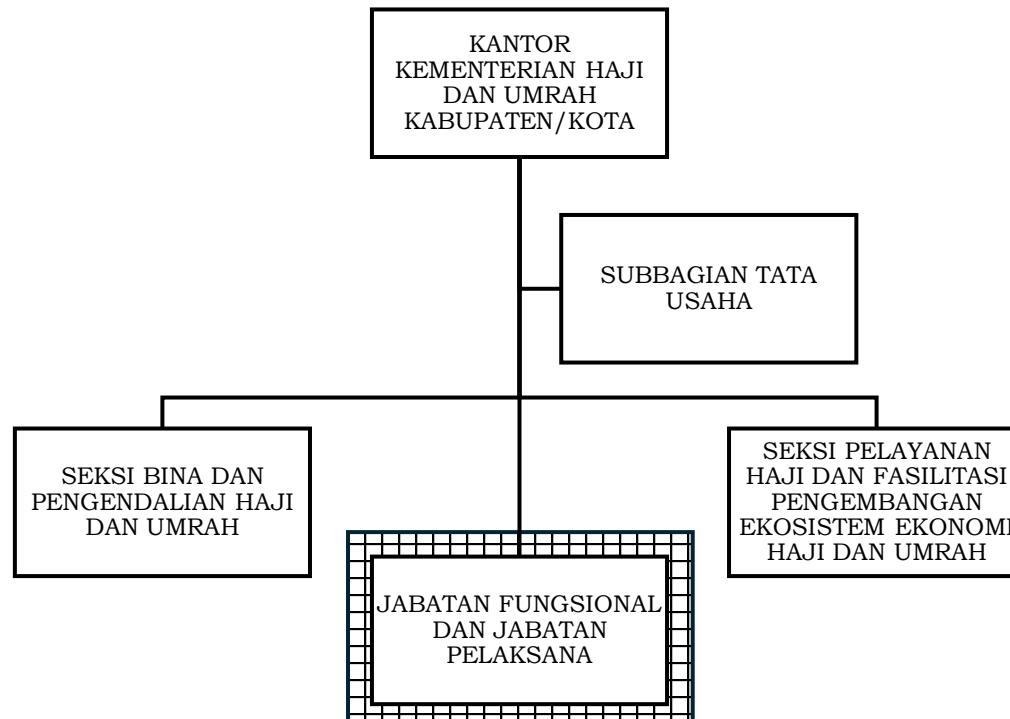
BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH TIPOLOGI A



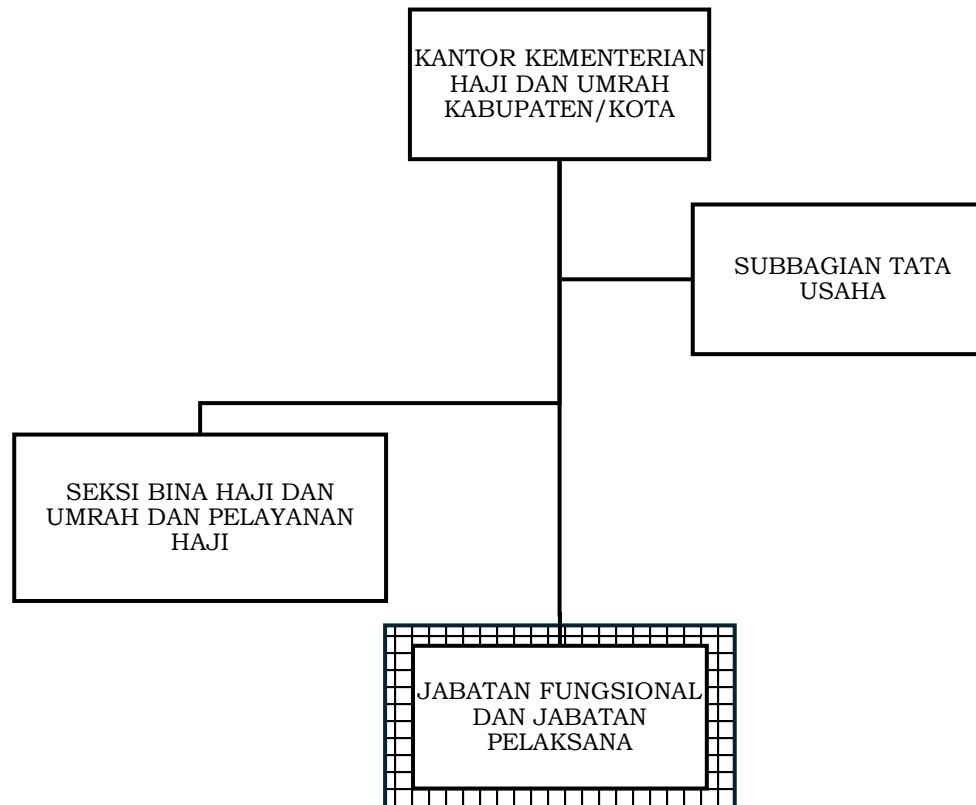
BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH TIPOLOGI B



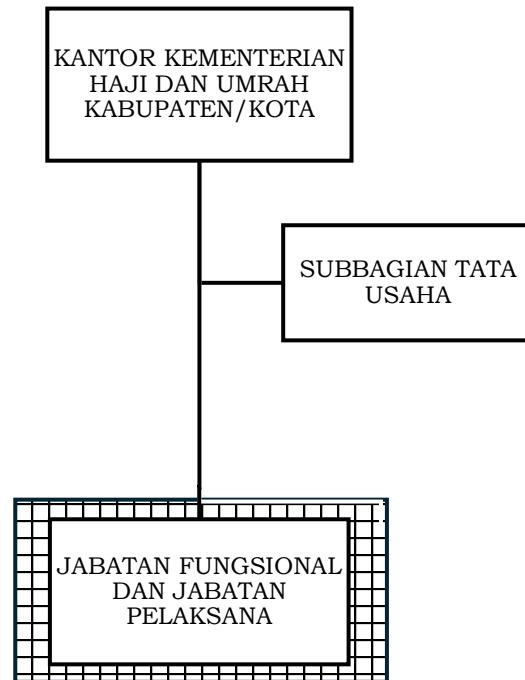
BAGAN ORGANISASI KANTOR KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH KABUPATEN/KOTA TIPOLOGI A



BAGAN ORGANISASI KANTOR KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH KABUPATEN/KOTA TIPOLOGI B



BAGAN ORGANISASI KANTOR KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH KABUPATEN/KOTA TIPOLOGI C



MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOCHAMAD IRFAN YUSUF